



PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
NON PERIJINAN KEPADA CAMAT

BUPATI NGANJUK ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi aparatur Kecamatan khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kelancaran penanganan sebagian urusan otonomi daerah di Kabupaten Nganjuk, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah bidang non perijinan kepada Camat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2739);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH NON PERIJINAN KEPADA CAMAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
4. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
5. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
6. Bagian administrasi Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan dan otonomi daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk.
8. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk.

### Pasal 2

- (1) Sebagian urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan merupakan urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Kantor.
- (2) Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan non perijinan.
- (3) Pelayanan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Daerah kepada kecamatan dapat disertai dengan pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB V  
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Dinas/Badan/Kantor melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
- (2) Bagian Adminitrasi Pemerintahan Umum bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 6

Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Daerah non perijinan yang telah dilimpahkan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dengan tembusan Dinas/Badan/Kantor sesuai dengan bidang urusan masing-masing, setiap 3 (tiga) bulan sekali meliputi laporan kinerja dan penyerapan anggaran.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 April 2020  
BUPATI NGANJUK ,

Diundangkan di Nganjuk,  
Pada tanggal 27 April 2020

Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
Kepala Dinas Perhubungan

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 19 TAHUN 2020  
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH NON PERIJINAN KEPADA CAMAT

No.	Bidang Urusan	Uraian Urusan	Keluaran (output)	Hasil (outcome)	OPD Pembina
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan	Fasilitasi, Koordinasi dan dukungan terkait dengan bidang pendidikan	Kegiatan / laporan	Terkoordinasinya kegiatan di bidang pendidikan	Dinas Pendidikan
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah anak sekolah (SD, SMP, SMA)	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah siswa miskin (SD, SMP, SMA)	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah Mahasiswa yang berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah Mahasiswa miskin	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data sekolah dan ruang kelas yang tidak layak digunakan (SD, SMP)	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah siswa putus sekolah	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
2	Kesehatan	Koordinasi Penyuluhan dan penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	kegiatan	Terpantaunya daerah dikecamatan yang rawan DBD	Dinas Kesehatan
		Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat-obatan terlarang	kegiatan	Berkurangnya penyalahgunaan narkoba di kecamatan	
		Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat ;	kegiatan	meningkatnya kesehatan masyarakat	
		Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan	Laporan	Terpantaunya jumlah pelayanan kesehatan di kecamatan	

Rekomendasi rujukan bagi masyarakat miskin	rekomendasi	Tercukupinya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk dan stunting skala kecamatan	Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita Keluarga Miskin (Gakin)	Terwujudnya kualitas kesehatan masyarakat yang maksimal
Upaya Penurunan Angka kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB)	Kordinasi kegiatan	Terwujudnya penurunan AKI dan AKB
Penyelenggaraan pendataan data dasar kesehatan lingkungan	Koordinasi	Terwujudnya data dasar rumah sehat, jamban sehat, sarana air bersih, tempat-tempat umum saluran air bersih
Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat	kegiatan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan obat
Pemantauan Pertumbuhan balita	Kegiatan	Terlaksananya kegiatan pendampingan balita di kecamatan
Penyelenggara deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular pada masyarakat usia produktif 15 s.d 59 thn	Kegiatan	Terdeteksinya Penyakit tidak menular pada masyarakat di kecamatan
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (GERMAS) melalui tokoh, kelompok masyarakat, ormas	kegiatan	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
Fasilitasi penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	kegiatan	Tertanganinya ODGJ

		Koordinasi Pembentukan kader-kader jumentik, kader TBC, Kader HIV di wilayah kecamatan, desa, kelurahan	kegiatan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya DBD, TB,HIV	
		Pemantauan dan rekomendasi data Stunting	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data gizi buruk	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data anak usia emas	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data Ibu Hamil	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data Jumlah kader bidang kesehatan di desa	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data klasifikasi penyakit berat	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah orang berpenyakit mental	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
3	Lingkungan Hidup	Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kecamatan	Laporan	Tersedianya data kualitas lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemantauan ketersediaan tempat pembuangan sampah di desa	Laporan	Tersedianya data jumlah TPS per desa/kelurahan	
		Pemantauan kebersihan pasar	Laporan	Terpantaunya data pasar bersih di kecamatan	
		Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Laporan	Tersedianya data	
		Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup	laporan	Tersedianya laporan tentang perusakan lingkungan hidup	
		Pemantauan dan rekomendasi data ketersediaan tempat penampungan sampah sementara di desa	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data ketersediaan tempat penampungan sampah sementara di pasar	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	

		Pemantauan dan rekomendasi data penampungan resapan air hujan	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data sumber air di desa	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data perlindungan mata air di desa	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data sumber air di daerah industri/pabrik	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah Kelompok Keswadyaan Masyarakat (KSM)	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
4	Pekerjaan Umum	Pemantauan Rumah Tidak Layak Huni di Desa dan kelurahan	Laporan	Tersedianya data rumah tidak layak huni	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rekomendasi pengusulan bantuan untuk Rumah Tidak layak huni	Rekomendasi	Terbantunya masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Pemantauan kawasan kumuh	Laporan	Tersedianya laporan data kawasan kumuh <u>dikecamatan</u>	
		Pemantauan Rumah bersanitasi dan MCK Layak di Desa/Kelurahan	Laporan	Tersedianya laporan sanitasi di <u>desa/kelurahan</u>	
		Pemantauan jumlah Rumah Penduduk	Laporan	tersedianya laporan yang akurat perihal rumah penduduk	
		Pemantauan dan rekomendasi data jalan dan jembatan kabupaten yang rusak	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jalan dan jembatan desa yang rusak	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah irigasi di areal persawahan yang rusak	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data pemanfaatan ruang	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data pemanfatan ruang terbuka hijau	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	

5	Sosial	Rekomendasi data kemiskinan dalam verval Basis data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu	Rekomendasi	Terpantaunya desa/kelurahan yang sudah memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan	Dinas Sosial P3A
		Rekomendasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rekomendasi	Pengendalian masalah sosial	
		Koordinasi Pembinaan Karang Taruna	Kegiatan	Meningkatnya peran pemuda desa/kelurahan dalam pembangunan di kecamatan	
		Koordinasi penanganan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Laporan	Terwujudnya Tertib administrasi	
		Pemantauan dan rekomendasi data warga usia produktif dan lansia	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah PSK dan Eks-PSK	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
6	Administrasi Kependudukan	Pencetakan KK	cetak KK	Tercetaknya KK dikecamatan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Perekaman KTP	Cetak KTP	Tercetaknya KTP di kecamatan	
		Keterangan Administrasi kependudukan lainnya	Dokumen surat keterangan	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	
7	Ketenaga kerjaan Koperasi dan UKM	Pendampingan serta pemantauan kegiatan perkoperasian, usaha Mikro	Laporan	Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan usaha Mikro di Desa/Kelurahan	Dinas Tenaga Kerja Koperasi UKM
		Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.	Laporan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di wilayah kecamatan	
		Pemantauan dan rekomendasi data pekerja lulusan SMP	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data pekerja lulusan SMA	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data pekerja lulusan Sarjana	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	

		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah usaha Mikro berdasarkan kategori	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah koperasi simpan pinjam	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah industri	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah hotel/penginapan	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penyelesaian kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kordinasi kegiatan Kabupaten layak anak Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Laporan  Laporan  Kegiatan	Menurunnya kasus KDRT di kecamatan  Tertib administrasi  Terciptanya keluarga yang tangguh, mandiri dan sejahtera	Dinas Sosial P3A
9	Pertanahan	Fasilitasi dan koordinasi permasalahan tanah warga maupun TKD di kecamatan  Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya  Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;  Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;	Laporan  Laporan  Laporan	Terfasilitasi penyelesaian kasus tanah dikecamatan  Tertib administrasi pertanahan kecamatan  Tertib administrasi pertanahan kecamatan  Tertib administrasi pertanahan kecamatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, BPKAD
		Pemantauan dan rekomendasi data luas tanah sawah basah	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data luas tanah sawah kering	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	

		Pemantauan dan rekomendasi data luas tanah yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM)	Tersusunnya laporan	Tersedianya data				
10	Kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan Ketentraman ketertiban umum	Koordinasi Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa dengan forpimcam	Kegiatan	Terwujudnya pemahaman tentang NKRI dan persatuan kesatuan masyarakat	Kantor Kesbangpol & Satuan Pol PP			
		Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan	Laporan	Terwujudnya tertib laporan trantibum				
		Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya	Laporan	Terwujudnya tertib laporan trantibum				
		Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama	Laporan	Terwujudnya kerukunan umat beragama				
		Pemantauan terhadap pos keamanan lingkungan (poskamling)	Kegiatan	Terwujudnya lingkungan yang aman dikecamatan				
		Laporan kejadian bencana maupun masalah keamanan ketertiban	laporan	terwujudnya tertib administrasi				
		Pemantauan dan rekomendasi data pos keamanan lingkungan (poskamling)	Tersusunnya laporan	Tersedianya data				
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah tokoh masyarakat	Tersusunnya laporan	Tersedianya data				
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah tokoh pemuda	Tersusunnya laporan	Tersedianya data				
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah gangguan ketertiban	Tersusunnya laporan	Tersedianya data				
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah Eks Narapidana	Tersusunnya laporan	Tersedianya data				
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah tempat ibadah	Tersusunnya laporan	Tersedianya data				
				Pemantauan dan rekomendasi data jumlah kafe dan tempat hiburan malam		Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
				Pemantauan dan rekomendasi data jumlah kegiatan keagamaan		Tersusunnya laporan	Tersedianya data	

11	Kebudayaan dan pariwisata	Pemantauan dan koordinasi terkait desa wisata	Laporan	Terwujudnya desa wisata unggulan	Dinas Pariwisata, kepemudaan, olahraga, kebudayaan
		Rekomendasi Pengelolaan usaha wisata skala kecil di kecamatan	Laporan	Terwujudnya tertib administrasi	
		Pembinaan Pengelolaan usaha wisata skala kecil di kecamatan	Rekomendasi	Terwujudnya tertib administrasi	
12	Kelautan, Perikanan	Pemantauan jumlah peternak ikan	Laporan	Terwujudnya tertib administrasi data perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pembinaan pengelolaan perikanan oleh Kelompok Pengawas Masyarakat dan kelompok Pembudidayaan Perikanan	Kegiatan	Meningkatnya peran masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan	
13	Urusan Penunjang, Pemerintahan Umum dan Otda	Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa	Laporan	Tertib administrasi dan terselesainya permasalahan	Setda, Dinas PMD, BPKAD, Inspektorat, Bappeda
		Fasilitasi Penyusunan Raperdes	Dokumen	Tertib administrasi pengajuan raperdes	
		Rekomendasi Pengajuan Raperdes ke Kabupaten	Rekomendasi	Tertib administrasi pengajuan raperdes	
		Pembinaan Administrasi Desa Tingkat Kecamatan	Kegiatan	Tertib administrasi desa	
		Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan	Nominasi Pemenang Tingkat Kecamatan	Terwujudnya peningkatan Motivasi Perkembangan Desa	

		Rekomendasi atas laporan pertanggung jawaban akhir jabatan Kepala Desa ;	Rekomendasi	Terwujudnya tertib administrasi desa	
		Memberikan rekomendasi dan catatan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rekomendasi	Terwujudnya tertib administrasi desa	
		Pembinaan terkait penggunaan, pemanfaatan dan Fasilitas pendayagunaan Tanah Desa dan Tanah Kas Desa	Kegiatan	Terwujudnya tertib administrasi desa	
14	Pertanian	Pemantauan dan rekomendasi data jumlah tanah sawah basah dan kering	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	Dinas Pertanian
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah petani	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data produksi (per jenis komoditi)	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah tengkulak	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah distribusi pupuk organik dan anorganik	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data Jumlah pembudidaya/peternak kambing, sapi, ayam, bebek, dll	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
15	Ketahanan Pangan Nasional	Pemantauan dan rekomendasi data Jumlah pembudidaya/peternak	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah pengusaha	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	
		Pemantauan dan rekomendasi data jumlah hewan ternak (per jenis)	Tersusunnya laporan	Tersedianya data	

BUPATI NGANJUK ,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001